

KATA PENGANTAR

*P*uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan Hidayah-Nya **Rencana Kerja Perubahan** Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disepakati, untuk dijadikan pedoman kerja tahunan guna mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Rencana Kerja Tahun 2020 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2018, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Secara umum, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat serta perubahan-perubahan Program-program kegiatan yang telah disesuaikan dan akan dilaksanakan pada tahun 2020. Rencana Kerja (*Performance Plan*) 2020 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2020 yang sepenuhnya mengacu pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia* dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Provinsi Jambi*.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman menyusun kegiatan prioritas Dinas Kehutanan tahun 2020.

Jambi, 2021

KEPALA DINAS

AKHMAD BESTARI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740508 1999031 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN		
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2018		
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018	7
2. Analisis Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	42
3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	43
4. Rancangan Awal RKPD	44
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		
1. Telaahan Terhadap Kebijakan	49
2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	51
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020		
1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020	55
BAB V : PENUTUP	73
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan instansi daerah Provinsi Jambi yang mengurus bidang kehutanan. Potensi sumber daya hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sangat vital untuk dipertahankan keberadaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian. Secara garis besar hutan mempunyai fungsi ekologi, fungsi produksi dan fungsi sosial. Agar memperoleh manfaat dari fungsi tersebut, hutan harus dikelola dengan arif dan bijaksana.

Semakin disadari bahwa kelestarian sumber daya hutan merupakan aset dan modal dasar bagi pembangunan Provinsi Jambi. Lebih jauh bahwa upaya pelestarian sumber daya hutan bukanlah hanya demi kelestarian hutan atau alam itu sendiri, namun hakekatnya adalah untuk kelangsungan pembangunan bangsa dan kesejahteraan manusia. Melihat kecenderungan global dengan berbagai isu strategis baik pada tataran lokal, nasional bahkan internasional bahwa keberadaan hutan dengan berbagai aspeknya pada masa yang akan datang tetap merupakan suatu pilihan.

Seirama dengan adanya pergeseran strategi pembangunan Kehutanan dari *conventional forestry* menuju *Forest Resource and Community Based Management*. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Provinsi Jambi* telah menempatkan program optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam berbasis lingkungan dan rendah karbon dalam mendukung dan menggerakkan perekonomian daerah.

Jambi sebagai salah satu provinsi yang kaya akan potensi alam dengan panorama yang indah dan unik serta kelengkapan diversitas potensi alam juga melengkapi khasanah alam Jambi dengan semboyan "*Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*". Namun khasanah sumberdaya hutan di Provinsi Jambi tentunya menyimpan tantangan pada berbagai tahapan pengelolaannya. Keadaan ini tentunya perlu disikapi secara bijaksana sehingga upaya untuk mencapai kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat menjadi suatu kenyataan. Permasalahan dan dinamika dalam suatu pengelolaan hutan hendaknya menghantarkan pada suatu kesadaran dan penyadaran tentang pentingnya kelestarian sumberdaya hutan.

Luas kawasan hutan di Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 adalah $\pm 2.098.535,00$ Ha atau $\pm 42,98$ % dari luas daratan di Provinsi Jambi.

Pembagian kawasan hutan di Provinsi Jambi terdiri dari :

a.	Hutan Produksi Terbatas	$\pm 258.285,00$ Ha
b.	Hutan Produksi Tetap	$\pm 963.792,00$ Ha
c.	Hutan Produksi Konversi	$\pm 11.399,00$ Ha
d.	Hutan Lindung	$\pm 179.588,00$ Ha
e.	Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam	$\pm 685.471,00$ Ha

2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019
- i. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPB).
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 - 2033 (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021;
- o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);
- p. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- q. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- r. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021
- s. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

- t. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penyusunan organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- u. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Taman Hutan Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019.
- c. Penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jambi Tahun 2016 -2021

4. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari 8 Bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- 2.3. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
- 2.4. Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020

- 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI KINERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2020

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2020 telah melaksanakan 104 **kegiatan** dalam **9 Program** untuk memenuhi Kebijaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi. Terhadap masing-masing program dan kegiatan tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

I. Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

Program pemberdayaan sumber daya hutan memiliki 17 (tujuh belas) kegiatan bertujuan agar mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Total dana yang dianggarkan untuk program ini

adalah sebesar Rp. 777.209.000,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2020. Realisasi Rp. 158.803.727,- atau sebesar 20,43 % sedangkan realisasi fisik 21%.

1. Pengembangan Hutan Tanaman

Jumlah anggaran Rp. 34.548.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 21.912.400,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terkendalinya pengawasan pada pemegang izin.

Realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2020 yaitu :

a. Pengendalian pengawasan pada 2 izin IUPHHK HTI.

2. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

Jumlah anggaran Rp. 26.048.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 5.460.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu.

Realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2020 yaitu :

a. Pengawasan potensi hasil hutan bukan kayu pada 2 UPTD KPHP

3. Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Jumlah anggaran Rp. 209.712.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 45.248.400,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud pengumpulan data dan fasilitasi penataan batas HD, HTR, HKm dan HA di Provinsi Jambi.

Realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2020 yaitu :

a. Fasilitasi 3 ijin HTR, HD dan HKm

4. Pengembangan Industri Dan Pemasaran Hasil Hutan

Jumlah anggaran Rp. 29.848.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 8.193.039,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terpantaunya industri yang dimonitoring dan dievaluasi.

Realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2020 yaitu :

a. 1 IPHHK yang dimonitoring dan dievaluasi

5. Pengembangan Pengujian Dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

Jumlah anggaran Rp. 56.052.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 25.224.838,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud

melakukan pembinaan IUPHHK/HT/HA dan hutan hak yang sudah mendapat sertifikasi legalitas.

Realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2020 yaitu :

a. Pembinaan pada 1 IUPHHK HT/HA dan Hutan Hak

6. Pemanfaatan Dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I dengan jumlah anggaran 29.372.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 5.850.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud melakukan pembinaan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan.

Realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2020 yaitu :

a. Pembinaan pada 1 KTH

7. Pemanfaatan Dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III dengan jumlah anggaran 30.038.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.266.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud melakukan pembinaan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan.

Realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2020 yaitu :

a. Pembinaan 1 kali pada KTH

8. Pemanfaatan Dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI dengan jumlah anggaran 32.974.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 3.475.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud melakukan pembinaan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan.

Realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2020 yaitu :

a. Pembinaan 1 kali pada KTH

II. Program Rehabilitasi hutan dan Lahan

Program ini memiliki 16(Enam belas) kegiatan pendukung dengan total dana sebesar Rp 9.559.572.000. melalui dana APBD Provinsi Jambi dan DAK Kehutanan Tahun 2018. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan secara optimal dan lestari, sehingga dapat meningkatnya tutupan lahan dan terjaganya kawasan hutan dari perambahan/illegal logging. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.024.328.381,- atau sebesar 42,10 %, sedangkan fisik 45,00 %.

1. Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
Jumlah anggaran Rp. 437.360.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 435.913.500,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terpeliharanya sarana dan prasarana TAHURA sekitar Tanjung.
Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :
 - a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
 - b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
2. Pemeliharaan Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
Jumlah anggaran Rp. 589.056.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 588.415.200,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terpeliharanya sarana dan prasarana Kebun Raya Bukit Sari dan Taman Hutan Kota.
Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :
 - a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
 - b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
 - c. Pemeliharaan dan pengelolaan Taman Hutan Pinus Kenali sebagai Destinasi Wisata alam seluas seluas 10,25 Ha dan tembok pembatas hutan kenali sepanjang 100 m lari dengan ketinggian 3,50 m serta memproduksi 10.000 Bibit berkualitas (Angsana, Sungkai, Gaharu, Durian dan Mangga)
 - d. Penerimaan PAD dari Tiket masuk di Taman Hutan Kenali sebesar Rp. 105.850.000,-
3. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Jumlah anggaran Rp. 308.052.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 265.826.627,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud

terkedalinya kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan oleh IPPKH di Provinsi Jambi.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
- c. Pengendalian RHL di 9 kabupaten 2 kota

4. Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Jumlah anggaran Rp. 96.128.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 87.997.934,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud Meningkatkan pengelolaan DAS di Provinsi Jambi.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Dokumen Pengelolaan DAS Provinsi Jambi sebanyak 1 Dokumen

5. Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata di KPH Merangin

Jumlah anggaran Rp. 138.724.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 133.914.100,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menurunkan persentase lahan kritis sebesar 0.1 % di Provinsi Jambi.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

- a. Penanaman pada areal kritis seluas 5 ha

6. Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata di KPH Hilir Sarolangun

Jumlah anggaran Rp. 138.724.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 79.270.800,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menurunkan persentase lahan kritis sebesar 0.1 % di Provinsi Jambi.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

- a. Penanaman pada areal kritis seluas 5 ha

7. Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata di KPH Bungo

Jumlah anggaran Rp. 138.724.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 102.842.400,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menurunkan persentase lahan kritis sebesar 0.1 % di Provinsi Jambi.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

- a. Penanaman pada areal kritis seluas 5 ha
8. Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I
Jumlah anggaran Rp. 138.736.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 134.911.500,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menurunkan persentase lahan kritis sebesar 0.1 % di Provinsi Jambi.
Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :
 - a. Penanaman pada areal kritis seluas 5 ha
9. Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
Jumlah anggaran Rp. 138.724.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 98.040.000,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menurunkan persentase lahan kritis sebesar 0.1 % di Provinsi Jambi.
Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :
 - a. Penanaman pada areal kritis seluas 5 ha
10. Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
Jumlah anggaran Rp. 138.724.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 6.898.000,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menurunkan persentase lahan kritis sebesar 0.1 % di Provinsi Jambi.
Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :
 - a. Penanaman tidak dilaksanakan, realisasi keuangan untuk pembayaran honor PPTK dan perjalanan dinas
11. Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
Jumlah anggaran Rp. 138.724.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 2.250.000,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menurunkan persentase lahan kritis sebesar 0.1 % di Provinsi Jambi.
Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :
 - a. Penanaman tidak dilaksanakan, realisasi keuangan untuk pembayaran honor PPTK
12. Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD KPHP Hulu Sarolangun Unit VII
Jumlah anggaran Rp. 138.724.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 0,-, Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan kurangnya komitmen Kepala KPHP untuk melaksanakan kegiatan penanaman.

13. Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
Jumlah anggaran Rp. 138.724.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 0,-, Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan kurangnya komitmen Kepala KPHP untuk melaksanakan kegiatan penanaman.
14. Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
Jumlah anggaran Rp. 138.724.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 0,-, Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan kurangnya komitmen Kepala KPHP untuk melaksanakan kegiatan penanaman.
15. Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
Jumlah anggaran Rp. 138.724.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 0,-, Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan kurangnya komitmen Kepala KPHP untuk melaksanakan kegiatan penanaman.
16. Peningkatan pengelolaan KPH, Tahura, Hutan Kota, Hutan Rakyat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (Dana DAK)
Jumlah anggaran Rp. 6.603.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 2.088.048.320,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud Meningkatkan pengelolaan DAS di Provinsi Jambi.
Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :
- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
 - b. Pembangunan 10 Kantor Resort di Provinsi Jambi

III. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan memiliki 18 (Delapan belas) kegiatan bertujuan agar mengoptimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp 3.723.601.720,00 melalui dana APBD Provinsi Jambi dan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2018. Realisasi Rp. 3.380.941.149,00 atau sebesar 90,80 %, sedangkan realisasi fisik 91,10 %.

1. Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.738.491.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.504.687.550,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang bebas asap dan menurunkannya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 :

- a. 10 kali Sosialisasi sebanyak 10 kali di Kab. Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Batanghari, Merangin, Sarolangun, Kerinci, Bungo, Tebo dan Kota sungai Penuh
- b. Terlaksananya sosialisasi Permen LHK di 15 Hutan Desa (3 kabupaten)
- c. Pemadaman Karhutla 10 kali di 2 Kabupaten (Kerinci dan Muaro Jambi)
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat yang tergabung dalam MPA (Masyarakat Peduli Api) dan pemegang ijin dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan

2. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
Dari jumlah anggaran Rp. 207.461.720,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 205.252.800,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terlaksananya penyuluhan kehutanan dalam mendukung kebijakan pembangunan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan sumber daya hutan.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi

- b. Pelaksanaan lomba penghargaan Wana Lestari
3. Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan.

Dari anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 581.052.485,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terwujudnya kawasan hutan yang bebas perambahan dan tertibnya peredaran hasil hutan di Provinsi Jambi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

 - a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
 - b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
 - c. Pengamanan kayu ilegal dan 3 unit mobil pengangkut (Truk) serta 1 Unit Alat Berat (Exavator)
 - d. 15 kali operasi pengamanan, Muaro Jambi = 8 kali, Tanjab Timur = 2 kali, Tanjab Barat = 3 kali, Tebo = 2 kali dan Bungo = 1 kali
4. Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Dari anggaran sebesar Rp. 156.304.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 153.349.915,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar tertibnya pinjam pakai kawasan hutan untuk keperluan diluar kehutanan.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

 - a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
 - b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
 - c. Evaluasi pada 2 Pemegang ijin IPKKH, PT. Petrochina (Tanjung Jabung Barat) dan PT. Seleraya (Sarolangun)
5. Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan

Dari anggaran sebesar Rp. 308.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 306.761.499,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terdata dan terfasilitasinya masalah konflik kepemilikan lahan di Provinsi Jambi.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
 - b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
 - c. Monitoring konflik ke 6 kabupaten
6. Pemantapan kawasan hutan
- Dari anggaran sebesar Rp. 216.791.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 200.013.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar semakin mantapnya batas kawasan hutan lahan di Provinsi Jambi. Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :
- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
 - b. Sosialisasi batas di 4 kecamatan
7. Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keanekaragaman hayati
- Dari anggaran sebesar Rp. 166.554.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 166.554.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar teridentifikasinya konservasi keanekaragaman hayati di Provinsi Jambi. Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :
- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
 - b. Sosialisasi KEE sebanyak 2 kali di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan rancangan Pergub tentang penetapan Pantai Cemara sebagai KEE
8. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPH Kerinci
- Dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 29.373.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penting fungsi hutan di KPHP. Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :
- a. Penyuluhan pada masyarakat sebanyak 3 kegiatan
9. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPH Merangin
- Dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud

agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penting fungsi hutan di KPHP.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

a. Penyuluhan pada masyarakat sebanyak 3 kegiatan

10. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPH Limau Sarolangun

Dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 25.550.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penting fungsi hutan di KPHP.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

a. Penyuluhan pada masyarakat sebanyak 3 kegiatan

11. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPH Hilir Sarolangun

Dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 26.860.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penting fungsi hutan di KPHP.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

a. Penyuluhan pada masyarakat sebanyak 3 kegiatan

12. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPH Bungo

Dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 27.520.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penting fungsi hutan di KPHP.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

a. Penyuluhan pada masyarakat sebanyak 3 kegiatan

13. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPH Tebo Barat

Dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 17.205.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud

agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penting fungsi hutan di KPHP.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

a. Penyuluhan pada masyarakat sebanyak 2 kegiatan

14. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPH Tebo Timur

Dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 8.460.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penting fungsi hutan di KPHP.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

a. Penyuluhan pada masyarakat sebanyak 1 kegiatan

15. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPH Batanghari

Dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 19.351.500,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penting fungsi hutan di KPHP.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

a. Penyuluhan pada masyarakat sebanyak 2 kegiatan

16. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPH Muaro Jambi dan Kota Jambi

Dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 23.279.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penting fungsi hutan di KPHP.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

a. Penyuluhan pada masyarakat sebanyak 3 kegiatan

17. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPH Tanjung Jabung Timur

Dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 23.284.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud

agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penting fungsi hutan di KPHP.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

a. Penyuluhan pada masyarakat sebanyak 3 kegiatan

18. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPH Tanjung Jabung Barat

Dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 26.875.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penting fungsi hutan di KPHP.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2018 yaitu :

a. Penyuluhan pada masyarakat sebanyak 3 kegiatan

IV. Program Perencanaan dan Pengembangan

Program Perencanaan dan Pengembangan memiliki 2(Dua) kegiatan bertujuan agar lebih terencanaannya pengelolaan hutan di Provinsi Jambi. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp 333.172.000,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2018. Realisasi Rp. 300.255.477,- atau sebesar 90,12 %, sedangkan fisiknya 91,49 %.

1. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPHP/KPHL

Jumlah anggaran sebesar Rp. 158.728.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 128.821.477,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan terencananya kegiatan di KPHP/KPHL di Provinsi Jambi.

Realisasikegiatan ini selama tahun 2018 :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
 - b. Pembuatan 1 peta dan 1 dokumen
2. Akses Layanan informasi pemasaran hasil hutan

Jumlah anggaran sebesar Rp. 174.444.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 171.444.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan terbentuknya hutan desa dan hutan kemasyarakatan di provinsi Jambi.

Realisasikegiatan ini selama tahun 2018 :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Mengikuti 1 Pameran Nasional di Yogyakarta, dan Jambi Tuntas Expo 2018 di Jambi

V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 63.620.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 61.571.500,-, atau 96,78%, dengan realisasi fisik sebesar 96,78%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terciptanya kelancaran dalam surat menyurat. Realisasi kegiatan berupa belanja perangko, materai dan paket pengiriman.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 426.968.540,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 359.740.271,- atau 84,25 %, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik sehingga tercipta kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Realisasi kegiatan berupa belanja telepon, air dan listrik.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 372.810.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 360.276.000,- atau 96,64%, dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terciptanya administrasi keuangan dengan baik. Realisasi kegiatan berupa pembayaran honor panitia kegiatan, honor tim pengadaan barang dan jasa, honor pegawai non PNS.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 196.936.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp.196.835.900,- atau 99,95%, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terciptanya suasana kerja yang bersih dan nyaman dan dilaksanakan oleh pihak ke-3 (rekanan).

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 199.896.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 195.027.200,- atau 97,56%, dengan realisasi fisik sebesar 97,56 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya alat tulis kantor. Realisasi kegiatan berupa pembelian alat tulis kantor.

6. Penyediaan Cetak dan Penggandaan.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 130.875.000 yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 118.229.500,- atau 90,34%, dengan realisasi fisik sebesar 95,00 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Realisasi kegiatan berupa belanja cetak dan penggandaan.

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 54.752.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp.53.536.000,- atau 97,78%, dengan realisasi fisik sebesar 98,00 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya peralatan dan instalasi listrik kantor. Realisasi kegiatan berupa belanja alat listrik dan elektronik.

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 37.013.900,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 27.420.000,- atau 74,08%, dengan realisasi fisik sebesar 80,00%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

Realisasi kegiatan berupa biaya publikasi, belanja modal peralatan kantor, peralatan dapur, penghias ruangan, kembang hiasan dan pot bunga.

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 18.400.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 14.400.000,- atau 81,14%, dengan realisasi fisik sebesar 85 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya bahan bacaan. Realisasi belanja surat kabar/ majalah.

10. Penyediaan Makan dan Minum Rapat.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 65.697.000,- atau 77,29%, dengan realisasi fisik sebesar 83 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang dengan maksud tersedianya makan dan minum rapat. Realisasi belanja makan dan minum rapat.

11. Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 578.711.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 574.802.925,- atau 99,32%, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. Realisasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran sebesar Rp. 354.500.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 329.120.350,- atau 92,84%, dengan realisasi

fisik sebesar 98 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor. Realisasi belanja modal perlengkapan gedung kantor.

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah anggaran sebesar Rp. 105.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 104.545.650,- atau 99,57%, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya gedung kantor yang baik. Realisasi belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan belanja konstruksi lainnya.

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 685.448.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 535.907.680,- atau 78,18%, dengan realisasi fisik sebesar 85 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terpeliharanya kendaraan dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas. Realisasi belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak dan pelumas serta belanja surat tanda nomor kendaraan.

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 71.500.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 51.462.000,- atau 71,97%, dengan realisasi fisik sebesar 75 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud peralatan gedung kantor terpelihara dan semakin baik. Realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

VII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 302.500.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 257.070.000,- atau 84,98%, dengan realisasi fisik sebesar 95 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terciptanya keseragaman dalam berpakaian. Realisasi pembelian pakaian dinas PNS berupa PSH.

VIII. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 78.445.000,- atau 92,29%, dengan realisasi fisik sebesar 95 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terwujudnya peningkatan keterampilan dan kapasitas pegawai. Realisasi belanja pelatihan dan keterampilan PNS.

2. Peningkatan sumber daya pengelolaan penatausahaan keuangan dan asset

Jumlah anggaran sebesar Rp. 263.606.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 237.365.842,- atau 90,05 %, dengan realisasi fisik sebesar 95 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terwujudnya peningkatan keterampilan dan kapasitas pegawai bidang keuangan dan aset. Realisasi belanja pelatihan dan keterampilan PNS Khususnya bidang keuangan dan asset

IX. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 232.696.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 228.558.288,- atau 98,22%, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan terlaksananya penyusunan laporan keuangan berupa RKA, RKA-P, LKPJ, LKP dan laporan keuangan lainnya.

2. Monitoring dan evaluasi pelaporan

Jumlah anggaran sebesar Rp. 135.802.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 132.654.300,- atau 97.68 %, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan terlaksananya monitoring kegiatan bidang kehutanan di 11 KPHP/KPHL di Provinsi Jambi.

3. Pemantapan dan evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (PEP – RAD GRK)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 79.463.400,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 77.101.600,- atau 97,03 %, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan terlaksananya monitoring kegiatan PEP RAD-GRK Provinsi Jambi di 11 KPHP/KPHL dengan output berupa 1 (satu) buku PEP RAD-GRK Provinsi Jambi Tahun 2018 bidang kehutanan.

**TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2018**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	Fisik (%)
1	2		3	4	5
Jumlah			19,061,600,000	12,688,285,365	66.56
<i>1</i>	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		<i>2,164,983,240</i>	<i>2,028,066,296</i>	<i>93.68</i>
1	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Menyurat	63,620,000	61,571,500.00	86,02
2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pelaksanaan Pembayaran Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	426,968,540	359,740,271.00	96,57
3	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	372,810,000	360,276,000.00	96,57
4	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Presentase Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	196,936,000	196,835,900.00	99,97
5	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Presentase Penyediaan ATK	199,896,800	195,027,200.00	97,49
6	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Presentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	130,875,000	118,229,500.00	90,34
7	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Presentase Penerangan Kantor Dishut	54,752,000	53,536,000.00	97,78
8	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	37,013,900	27,420,000.00	57,91

9	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Presentase Penyelenggaraan administrasi yang baik	18,400,000	14,930,000.00	53.34
10	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Presentase pelaksanaan dan pelayanan terhadap penyediaan makanan dan minuman	85,000,000	65,697,000.00	68.52
11	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan Perjalanan Dinas	578,711,000	574,802,925.00	97.38
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,216,448,000	1,021,035,180	83.94
1	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Presentase kebutuhan peralatan gedung kantor dengan baik	354,500,000	329,120,350	89.97
2	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Presentase Perbaikan/ pemeliharaan gedung kantor dengan baik	105,000,000	104,545,650	99.80
3	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Presentase Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik	685,448,000	535,907,180	69.55
4	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Presentase Perbaikan/ pemeliharaan peralatan gedung kantor ditempat kerja semakin baik	71,500,000	51,462,000	69.63
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		302,500,000	257,070,000.00	100.00
1	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Presentase Keseragaman Pakaian Dinas Pegawai dan perlengkapannya	302,500,000	257,070,000.00	100.00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		348,606,000	315,810,842.00	33.46
1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Presentase SDM yang Berkualitas	85,000,000	78,445,000.00	33.46
2	Program peningkatan sumberdaya pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset	Jumlah SDM yang terlatih	263,606,000	237,365,842.00	94,05
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		447,961,400	438,314,188.00	98.80
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA, Renja, LKJ, Laporan Tahunan Kehutanan, LPPD, DPPA, DIPA, Renstra, laporan Kinerja A dan Singkronisasi Program	232,696,000	228,558,288.00	99.30

2	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Buku Statistik Kehutanan, Persentase terlaksananya Sinkronisasi Program, Monitoring evaluasi kegiatan APBD	135,802,000	132,654,300.00	99.50
3	Kegiatan Pemantapan dan Evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK)	Jumlah laporan pemantapan dan evaluasi RAD GRK Kab./Kota dan jumlah rapat teknis GRK	79,463,400	77,101,600.00	97.40
VI	Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan		964,755,640	922,463,852	95.62
1	Pengembangan Hutan Tanaman	Data dan laporan pengawasan HPH, HTI dan RE	158,029,000.00	156,094,400.00	98.78
2	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	peningkatan industri pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu di sektor kehutanan	132,160,000.00	131,458,200.00	100
4	Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial	Menfasilitasi pemberian akses kelola kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial	211,371,500.00	193,721,650.00	92,34

5	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatkan Produksi dan nilai tambah produk kehutanan serta daya serap tenaga kerja masyarakat	166,851,140.00	162,118,202.00	100
6	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan	296,344,000.00	279,071,400.00	100
VII	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		9,559,572,000	4,024,328,381	42.10
1	Kegiatan Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata	meningkatkan reklamasi dan RHL pada areal kawasan hutan	437,360,000.00	435,913,500.00	99,07
2	Kegiatan Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata	Meningkatkan pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	589,056,000.00	588,415,200.00	100

3	Kegiatan Pengendalian, dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	meningkatkan reklamasi dan RHL pada areal izin penggunaan kawasan hutan	308,052,000.00	265,826,627.00	88,28
4	Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya pengelolaan DAS	96,128,000.00	87,997,934.00	91,54
5	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPHP Merangin	Meningkatnya penanaman pohon di APL	138,724,000.00	133,914,100.00	95,73
6	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPHP Hilir Sarolangun	Meningkatnya penanaman pohon di APL	138,724,000.00	79,270,800.00	85,34
7	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPHP Bungo	Meningkatnya penanaman pohon di APL	138,724,000.00	102,842,400.00	68,00
8	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I	Meningkatnya penanaman pohon di APL	138,736,000.00	134,911,500.00	97,37
9	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Meningkatnya penanaman pohon di APL	138,724,000.00	-	-

10	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Meningkatnya penanaman pohon di APL	138,724,000.00	-	-
11	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Meningkatnya penanaman pohon di APL	138,724,000.00	-	-
12	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Meningkatnya penanaman pohon di APL	138,724,000.00	6,898,000.00	-
13	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Meningkatnya penanaman pohon di APL	138,724,000.00	2,250,000.00	-
14	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Meningkatnya penanaman pohon di APL	138,724,000.00	98,040,000.00	92,07
15	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,XVI dan XVII	Meningkatnya penanaman pohon di APL	138,724,000.00	-	-
16	Peningkatan pengelolaan KPH, TAHURA, Hutan Kota, Hutan Rakyat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan di KPHP	6,603,000,000	2,088,048,320	29.78
VIII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		3,723,601,720	3,380,941,149	90.80
1	Pengendalian dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Menurunnya kebakaran hutan dan lahan	1,738,491,000	1,504,687,550	87,01

2	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian fungsi hutan	207,461,720.00	205,252,800.00	76.13
3	Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan	Meningkatnya keamanan perlindungan kawasan hutan	600,000,000.00	581,052,485.00	96,85

4	Evaluasi izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Jambi	Meningkatkan kinerja IPPKH di Provinsi Jambi	156,304,000.00	153,349,915.00	98,84
5	Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan	Meningkatkan pengendalian terhadap Konflik Kawasan Hutan	308,000,000.00	306,761,499.00	100
6	Pemantapan Kawasan hutan	Meningkatkan pengendalian terhadap konflik Kawasan Hutan	216,791,000.00	200,013,000.00	92,35
7	Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keanekaragam hayati	Meningkatnya koservasi keanekaragaman hayati	166,554,000.00	165,888,400.00	100
8	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit I Kerinci	Menurunnya kerusakan hutan	30,000,000.00	29,805,000.00	99,35
9	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Menurunnya kerusakan hutan	30,000,000.00	27,520,000.00	99,75
10	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Menurunnya kerusakan hutan	30,000,000.00	30,000,000.00	100

11	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Menurunnya hutan	kerusakan	30,000,000.00	25,550,000.00	85,17
12	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Menurunnya hutan	kerusakan	30,000,000.00	26,860,000.00	91,37
13	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat	Menurunnya hutan	kerusakan	30,000,000.00	17,205,000.00	57,35
14	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	Menurunnya hutan	kerusakan	30,000,000.00	8,460,000.00	28,20
15	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Menurunnya hutan	kerusakan	30,000,000.00	19,276,500.00	64,51
16	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Menurunnya hutan	kerusakan	30,000,000.00	23,279,000.00	77,60
17	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Menurunnya hutan	kerusakan	30,000,000.00	29,105,000.00	77,61
18	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Menurunnya hutan	kerusakan	30,000,000.00	26,875,000.00	91,07
IX	Program Perencanaan dan Pengembangan			333,172,000	300,255,477	90.1

1	Perencanaan kegiatan Pengelolaan KPHP/KPHL	Peningkatan Penyusunan informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan	158,728,000.00	128,821,477.00	82,15
2	Akses Pelayanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan	Penyebarluasan Informasi di Bidang Kehutanan	174,444,000.00	171,434,000.00	100

II. Analisis Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 37 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-Satuan Organisasi pada Dinas-Dinas Provinsi Jambi, maka ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan susunan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi ;
 1. Tata kesatuan pengelolaan hutan
 2. Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan
 3. Pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan)
 4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara
 5. Pelaksanaan pengelolaan aset pemerintahan provinsi Jambi
 6. Pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi (kurang dari) $\leq 6000 \text{ M}^3$ /tahun dan
 7. Pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.
- c. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi, yaitu meliputi ,
 1. Perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas kabupaten/kota.
 2. Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konferensi internasional dan

pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

- d. Melaksanakan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
- e. Melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas kabupaten/kota dan dalam kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- f. Melaksanakan koordinasi kehutanan dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan
- g. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum

2. Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial Budaya
3. Pengembangan Ekonomi Rakyat, Investasi dan Kepariwisata
4. Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam Serta Lingkungan Hidup
5. Penataan Tata Pemerintahan yang Baik

Dan juga tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) Tahun 2016 -2021 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi.
2. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
3. Meningkatkan tata kelola kehutanan yang bersih, transparan dan akuntabel secara partisipatif
4. Tersedianya ketersediaan data geospasial bidang kehutanan
5. Mewujudkan perlindungan kawasan hutan
6. Mewujudkan tutupan lahan dan kawasan hutan

Berdasarkan capaian prioritas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terkait dengan capaian prioritas ke-4 yaitu : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

IV. Rancangan RKPD

Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 untuk Dinas Kehutanan tetap mengacu pada prioritas pembangunan kehutanan sebagai berikut :

- a. Pemantapan dan Penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan.
- b. Pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
- c. Restrukturisasi dan revitalisasi industri kehutanan
- d. Rehabilitasi hutan dan lahan
- e. Perlindungan hutan

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kehutanan maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

pada tahun 2020 merencanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan capaian prioritas daerah adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan kegiatan terdiri dari :
 1. Pengembangan hutan tanaman
 2. Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial
 3. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
 4. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
 5. Pengembangan hasil hutan non kayu
 6. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit I Kerinci
 7. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
 8. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin.
 9. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun.
 10. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun.
 11. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
 12. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit X Tebo Timur
 13. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
 14. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
 15. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
 16. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat

17. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di UPTD Tahura

b. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan terdiri dari :

1. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPH, KPHL
2. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
3. Pemantapan dan evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK)
4. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I
5. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
6. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
7. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Hulu Sarolangun Unit VII
8. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Hilir Sarolangun Unit VIII
9. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
10. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
11. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
12. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
13. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
14. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
15. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD Tahura
16. Pengelolaan hutan kenali

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
2. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan
3. Ground Chek Hotspot (Pengecekan titik panas) dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan

4. Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan
5. Pembentukan/pembinaan Masyarakat Sadar Api (MPA)
6. Pelatihan keteknikan untuk menunjang PLTB
7. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan
8. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan
9. Monitoring dan Evaluasi bekas kebakaran hutan dan lahan
10. Sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan
11. Monitoring sumber daya manusia dan sarana prasarana kebakaran
12. Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan
13. Pengamanan batas kawasan hutan dan kawasan hutan
14. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
15. Pemantapan kawasan hutan
16. Evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi
17. Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan
18. Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keaneragaman hayati
19. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I
20. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III.
21. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI
22. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Hulu Sarolangun Unit VII
23. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Hilir Sarolangun Unit VIII
24. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
25. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
26. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII

27. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
 28. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
 29. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII .
 30. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD Tahura
- d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
 2. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
 3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan.
 4. Monitoring pengelolaan DAS

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan

Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam hutan di Indonesia umumnya dan di Provinsi Jambi khususnya, tidaklah terletak pada suatu sisi pandang saja, tetapi justru saling terkait mulai dari sektor hulu yaitu eksploitasi, penataan ruang dan kawasan, sosial ekonomi masyarakat, sampai ke hilir berupa akses pasar produk-produk sektor kehutanan. Keterkaitan antara sektor dan tahapan pengelolaan sumberdaya hutan menjadi suatu dasar bagi kebijakan strategis dan tidak bersifat parsial dalam pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan di Propinsi Jambi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Aspek terkait Penataan Ruang dan Kawasan* : Adanya konflik kepentingan antara sektor Kehutanan dengan non-kehutanan menjadi

muara masalah penataan ruang dan kawasan yang berakibatnya berupa tumpang tindih penggunaan kawasan yang ada.

2. *Aspek pemasaran produk Kehutanan*; Kesenjangan kapasitas industri dengan kemampuan menyediakan bahan baku industri sampai pada permasalahan persaingan harga yang tidak kompetitif antara produksi yang legal dengan bentuk izin lainnya.
3. *Illegal Logging dan kebakaran hutan*; Krisis multi dimensi yang berkepanjangan berdampak pada mata pencaharian masyarakat hingga peningkatan lahan kritis akibat rusaknya kawasan hutan. Keadaan ini semakin diperparah oleh kondisi menjamurnya Industri Primer Hasil Hutan dan izin lainnya serta belum maksimalnya peran para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan.
4. *Kualitas Hutan yang semakin menurun*; adanya illegal logging dan kebakaran hutan merupakan faktor kuat bagi penurunan kualitas dan potensi sumberdaya hutan.
5. *Masalah kesejahteraan masyarakat sekitar hutan*; Belum tercapainya pendekatan yang komprehensif serta menyentuh seluruh dimensi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
6. *Sumber Daya Manusia Pengelola Hutan masih terbatas*, secara kuantitas jumlah polisi hutan, juru ukur, teknisi dan penyuluh kehutanan sangat terbatas, dan secara kualitas keterampilan dan kemampuannya harus ditingkatkan.
7. *Perubahan Iklim*, Isu perubahan iklim *saat ini sangat penting dimana Provinsi Jambi adalah termasuk daerah rawan bencana yang di timbulkan oleh alam misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan.*

Langkah strategis yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dalam pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan : melalui pembentukan Tim Terpadu dengan melibatkan multipihak (adat, tomas,

polri, TNI, Instansi terkait), sosialisasi / penyebarluasan hasil tata batas kawasan hutan melalui pendampingan/ penyuluhan.

2. Percepatan Pembangunan HTR, HD dan kemitraan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan.
3. Kampanye menanam dan pemberian bibit tanaman kehutanan disertai even kegiatan kehutanan kepada seluruh lapisan masyarakat guna merehabilitasi kawasan hutan.
4. Patroli Terpadu (pengamanan dan menanam tanaman kehutanan) ; Peningkatan SDM Polhut, Sarpras dan pendanaan pengamanan hutan di daerah serta penyuluhan/ sosialisasi penegakan hukum
5. Meningkatkan pelayanan usaha kehutanan dan tertib peredaran hasil hutan ; Peningkatan usaha Hutan Tanaman, Hutan Alam dan Hutan Rakyat, fasilitasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.
6. Mengantisipasi dampak dari perubahan iklim sedini mungkin dengan cara memberikan kesadaran pada masyarakat untuk menjaga lingkungan.
7. Bekerja sama dengan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kehutanan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk Rehabilitasi Hutan dan peningkatan ekonomi sekitar hutan

2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi Rencana Strategik tertuang dalam penjabaran dari Program-program dan kegiatan-kegiatan strategik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kinerja/ kegiatan tersebut sebagai suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Lebih jauh dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari

suatu rencana strategik yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Pada tahun 2018 terdapat sejumlah kegiatan yang memberi nuansa serta upaya bagi pencapaian visi, misi, dan sasaran organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Implementasi yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2020 mencakup **16 Kegiatan** dalam **4 Program** untuk pembangunan kehutanan dan **21 Kegiatan** dalam **5 Program** untuk rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi guna mendukung **4 Kebijakan Prioritas Pembangunan Kehutanan**. Ikhtisar program dan kegiatan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kebijakan 1

“ Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan”

- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan kegiatan terdiri dari:
- a. Pembangunan KPHP, KPHL
 - b. Pengembangan hutan tanaman
 - c. Pengembangan kelompok tani usaha kehutanan dan pengembangan hutan masyarakat adat
 - d. Fasilitasi budidaya taaman pangan berbasis agroforestri
 - e. Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial
 - f. Pengembangan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu
 - g. Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor kehutanan
 - h. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
 - i. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
 - j. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
 - k. Pengembangan hasil hutan non kayu
 - l. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit I Kerinci
 - m. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit II dan III Bungo.
 - n. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit II dan III Bungo.
 - o. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IV,V dan VI Merangin
 - p. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
 - q. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
 - r. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat

Kebijakan 2

“Perencanaan dan Pengembangan Hutan”

Program Perencanaan dan pengembangan hutan kegiatan terdiri dari :

- a. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPHP, KPHL
- b. Penelitian terpadu terhadap usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan
- c. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
- d. Pemantapan dan Evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
- e. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit I Kerinci
- f. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
- g. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin
- h. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
- i. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
- j. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
- k. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur
- l. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
- m. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
- n. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
- o. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
- p. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD TAHURA
- q. Pengelolaan hutan kenali

Kebijakan 3

“Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam”

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
2. Monitoring sumber daya manusia dan sarana dan prasarana kebakaran
3. Pengamanan hutan
4. Pengamanan batas kawasan hutan
5. Koordinasi penegakkan hukum dalam rangka pemanggilan saksi/tersangka/ahli serta pengurusan ijin sita pengadilan Kabupaten/Kota
6. Bimbingan teknis penggunaan senjata api
7. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
8. Pemantapan kawasan hutan
9. Evaluasi ijin pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi
10. Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan
11. Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keanekaragaman hayati

12. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit I Kerinci
12. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
13. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin
14. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
15. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
16. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
17. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur
18. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
19. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XIII Tanjung Jabung Timur
20. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XIV, XV dan XVI Tanjung Jabung Barat

Kebijakan 4

“Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
2. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
3. Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
4. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
6. Monitoring pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

3. Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020

Pada tahun 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

I. Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan dengan kegiatan terdiri dari :

18. Pengembangan hutan tanaman

- IUPHHK yang dimonitor 2 HPH, 2 RE dan 18 HTI.
- 3 laporan HPH, RE dan HTI

19. Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial

- 10 izin kelompok yang didampingi/fasilitasi untuk tata batas HD, HTR, HKm dan Hutan Adat Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
- 11 laporan pengawasan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

20. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

- Jumlah 11 IUPHHK HT/HA, dan Hutan Hak yang telah disertifikasi
- Jumlah 11 Pemegang Ijin HT/HA, Industri dan Hutan Hak yang telah menggunakan aplikasi Online
- Jumlah 9 kasus penegakan hukum yang diselesaikan

21. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
 - Jumlah sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat pelaku usaha mengenai pemanfaatan kayu rakyat sebanyak 22 kali.
 - Jumlah industri yang dimonitoring sebanyak 15 IUPHHK
22. Pengembangan Hasil hutan non kayu
 - Jumlah pemohon ijin HHBK yang difasilitasi sebanyak 6 pemohon
 - Jumlah ijin HHBK yang dimonitor sebanyak 2 ijin HHBK
 - Jumlah KPH yang mempunyai potensi HHBK sejumlah 2 KPH
23. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Kerinci Unit I
 - Pemanfaatan hutan oleh masyarakat di wilayah tertentu 2 unit
 - Alat ekonomi Produktif 1 unit
 - Pemantauan ijin yang ada pada areal KPHP sebanyak 16 kali
 - Monitoring dan fasilitasi PNBK da PAD sektor Kehutanan 1 tahun
 - Jumlah kasus bidang ilegal logging sebanyak 5 kasus
 - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan sebanyak 1 kemitraan
24. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
 - Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
 - Alat ekonomi Produktif 1 unit
 - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
 - Monitoring dan fasilitasi PNBK da PAD sektor Kehutanan
 - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
 - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
25. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IV,V dan VI Merangin
 - Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
 - Alat ekonomi Produktif 1 unit
 - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali

- Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
 - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
 - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
26. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP
Unit VI Hulu Sarolangun
- Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
 - Alat ekonomi Produktif 1 unit
 - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
 - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
 - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
 - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
27. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP
Unit VIII Hilir Sarolangun
- Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
 - Alat ekonomi Produktif 1 unit
 - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
 - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
 - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
 - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
28. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP
Unit IX Tebo Barat
- Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
 - Alat ekonomi Produktif 1 unit
 - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
 - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
 - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
 - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
29. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP
Unit XI dan XII Batanghari

- Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
 - Alat ekonomi Produktif 1 unit
 - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
 - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
 - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
 - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
30. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP
Unit XIII Muaro Jambi
- Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
 - Alat ekonomi Produktif 1 unit
 - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
 - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
 - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
 - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
31. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP
Unit XIV Tanjung Jabung Timur
- Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
 - Alat ekonomi Produktif 1 unit
 - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
 - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
 - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
 - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
32. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP
Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
- Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
 - Alat ekonomi Produktif 1 unit
 - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
 - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
 - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

- Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan

II. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan terdiri dari :

1. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPH, KPHL
 - Jumlah peta geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan sebanyak 12 peta.
 - Dokumen rencana kehutanan tingkat KPHP dan UPTD Tahura sebanyak 12 dokumen
2. Penelitian terpadu terhadap usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan
 - Jumlah dokumen alih fungsi lahan dan inventarisasi areal hutan sebanyak 11 dokumen
3. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan di dinas Kehutanan
 - Mengikuti pameran di luar provinsi 1 kali dan didalam 3 kali
4. Pemantapan dan evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
 - Jumlah laporan RADGRK 1 dokumen
5. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit I Kerinci
 - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
 - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
 - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
 - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
6. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit II dan III Bungo
 - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
 - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
 - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
 - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun

7. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit IV,V dan VI Merangin
 - Inventarisasi berkala dan petaan hutan 1.647 ha
 - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
 - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
 - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
8. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit VII Hulu Sarolangun
 - Inventarisasi berkala dan petaan hutan 1.647 ha
 - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
 - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
 - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
9. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit VIII Hilir Sarolangun
 - Inventarisasi berkala dan petaan hutan 1.647 ha
 - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
 - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
 - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
10. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit IX Tebo Barat
 - Inventarisasi berkala dan petaan hutan 1.647 ha
 - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
 - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
 - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
11. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit X Tebo Timur
 - Inventarisasi berkala dan petaan hutan 1.647 ha
 - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
 - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
 - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
12. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XI dan XII Batanghari
 - Inventarisasi berkala dan petaan hutan 1.647 ha
 - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
 - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
 - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
13. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XIII Muaro Jambi
 - Inventarisasi berkala dan petaan hutan 1.647 ha
 - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km

- Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
- Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun

14. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XIV Tanjung Jabung Timur

- Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
- Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
- Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
- Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun

15. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat

- Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
- Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
- Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
- Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun

III. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
 - Patroli dan ground chek sebanyak 110 kali
 - Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 66 kali
 - Bintek pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Pemegang IUPHHK HA/HTI dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 33 kali
 - Pelaksanaan koordinasi.
2. Monitoring Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kebakaran
 - Monev Saprass kebakaran hutan pada perusahaan 33 kali
 - Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 11 Kelompok
 - Pengadaan alat kebakaran 2 Unit
3. Pengamanan hutan

- Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan dan koordinasi pengamanan hutan sebanyak 55 kali
 - Rapat dan koordinasi
4. Pengamanan batas kawasan hutan
 - Patroli pengamanan batas kawasan sebanyak 66 kali
 5. Koordinasi penegakkan hukum dalam rangka pemanggilan saksi/tersangka/ahli serta pengurusan ijin sita pengadilan kabupaten/kota
 - Koordinasi proses penegakkan hukum sebanyak 50 kali
 6. Bimbingan teknis penggunaan senjata api
 - Pelatihan menembak dan pengawasan senjata api sebanyak 5 kali
 7. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
 - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan sebanyak 66 kali
 8. Pemantapan kawasan hutan
 - Sosialisasi tata batas kawasan hutan di 22 kecamatan
 - Jarak orientasi batas kawasan hutan sepanjang 60 km
 - Jarak rekontruksi batas kawasan hutan sepanjang 50 Km
 - Jarak Pemeliharaan rintis batas dan pal batas sepanjang 50 Km
 9. Evaluasi dan izin pinjam pakai kawasan hutan
 - Jumlah IPPKH yang dievaluasi sebanyak 11 IUPHHK
 10. Fasilitasi Konflik dalam kawasan hutan
 - Jumlah konflik yang diselesaikan sebanyak 11 konflik
 11. Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keaneka ragaman hayati di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
 - Jumlah identifikasi kawasan esensial sebanyak 33 kali
 12. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit I Kerinci
 - Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
 - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun

- Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
 - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
 - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
 - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
13. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit II dan III Bungo
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
 - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
 - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
 - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
 - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
14. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit IV,V dan VI Merangin
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
 - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
 - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
 - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
 - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
15. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit VII Hulu Sarolangun
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
 - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
 - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
 - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali

- Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
16. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit VIII Hilir Sarolangun
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
 - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
 - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
 - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
 - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
17. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit IX Tebo Barat
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
 - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
 - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
 - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
 - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
18. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit X Tebo Timur
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
 - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
 - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
 - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
 - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
19. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XI dan XII Batanghari
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.

- Patroli pengmanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
 - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
 - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
 - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
20. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XIII Muaro Jambi
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
 - Patroli pengmanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
 - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
 - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
 - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
21. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XIV Tanjung Jabung Timur
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
 - Patroli pengmanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
 - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
 - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
 - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
22. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
 - Patroli pengmanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
 - Fasilitasi penyuluhan 9 orang

- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
- Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun

IV. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1. Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan.
 - Koordinasi dan pengawasan sebanyak 33 kali
2. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
 - Pembibitan tanaman kehutanan sebanyak 110.000 batang
3. Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
 - Penanaman seluas 250 ha di 11 KPHP
 - Penanaman seluas 30 Ha di UPTD Tahura
4. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
 - Pemeliharaan tanaman di Tahura orang kayo hitam dan bukit sari
 - Jumlah fasilitas yang dibangun di taman hutan kenali sebanyak 4 unit.
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
 - Luas pemeliharaan arboreteum, TUL dan Hutan Adat seluas 220 ha
6. Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - Jumlah dokumen pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 11 Dokumen

V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13. Operasional rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetak dan pengandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
14. Operasional rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetak dan pengandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
15. Operasional rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetak dan pengadaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
16. Operasional rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetak dan pengadaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
17. Operasional rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetak dan pengadaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
18. Operasional rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetak dan pengadaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

19. Operasional rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetak dan pengadaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

20. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetak dan pengadaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

21. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetak dan pengadaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
22. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetak dan pengadaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
23. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetak dan pengadaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
2. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan

VII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan

VIII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
2. Peningkatan sumber daya pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset

IX. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasai ikhtisar kinerja SKPD
 - Termonitornya laporan kinerja dinas bidang keuangan
 - Target capaian 7 dokumen
2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - Terencanannya perencanaan yang baik dan terukur sesuai dengan program – program yang dilaksanakan oleh bidang.

- Target Capaian 5 Dokumen Monev

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Revisi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2016 - 2021 sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk menerapkan kinerja yang baru dan benar – benar yang tepat sasaran. Target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicantumkan dalam RPJMN Republik Indonesia dan juga Provinsi Jambi Khususnya Dinas Kehutanan berkaitan dengan Tingkat Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi terutama target capaian penurunan titik api dan peningkatan luas kawasan hutan yang tertutup pohon dan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca, sehingga dengan terwujudnya target capaian tersebut visi dan misi pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi dapat diwujudkan.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat diselesaikan secara arif dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan *good governance* yang lebih baik dimasa mendatang.

Untuk lebih mengefektifkan fungsi dan kompetensi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2016-2021, maka dipandang perlu upaya peningkatan terhadap capaian kinerja pada berbagai tahapan kegiatan, program, dan kebijaksanaan antara lain melalui ;

1. Optimalisasi kerjasama internal lingkup kehutanan dan eksternal lintas instansi,
2. Optimalisasi dan efektifitas alokasi anggaran berupa dukungan dana serta jumlah maupun kemampuan/ profesionalisme SDM bagi upaya pencapaian kinerja sesuai kondisi objektif.
3. Peran serta dari pihak lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan perlu ditingkatkan untuk menunjang kegiatan bidang kehutanan

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Revisi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 ini dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran aparaturnya Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam melaksanakan Program Kerja Tahunan guna mewujudkan keberhasilan visi dan misi kedepan, yang sekaligus dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.